



Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023

Marhamah^{1*}, Iwan Harsono²

^{1,2} Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 23, 2025

Revised June 28, 2025

Accepted June 29, 2025

Available online June 29, 2025

Kata Kunci :

Pendapatan Asli Daerah,
Desentralisasi Fiskal, Kemandirian
Keuangan, Ketergantungan Fiskal,
Efektivitas PAD, Kota Mataram

Keywords:

Local Original Income, Fiscal
Decentralization, Financial
Independence, Fiscal Dependence,
PAD Effectiveness, Mataram City



This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Marhamah Iwan
Harsono. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi PAD dalam mengukur kemandirian keuangan Kota Mataram selama periode 2018–2023. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis rasio keuangan berdasarkan empat indikator utama: rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian fiskal, dan rasio efektivitas PAD. Data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Mataram serta dokumen resmi dari Badan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi dan efektivitas PAD Kota Mataram tergolong sangat baik, dengan kontribusi PAD di atas 25% dan efektivitas realisasi PAD selalu melampaui 100%. Namun, tingkat ketergantungan fiskal tetap tinggi (di atas 65%), dan rasio kemandirian fiskal menunjukkan tren fluktuatif yang cenderung stagnan, kecuali pada tahun 2019.

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of PAD in measuring the financial independence of Mataram City during the 2018-2023 period. The method used is descriptive quantitative with a financial ratio analysis approach based on four main indicators: degree of decentralization ratio, fiscal dependency ratio, fiscal independence ratio, and PAD effectiveness ratio. Data were obtained from the Budget Realization Report (LRA) of the Mataram City Government and official documents from the Regional Finance Agency. The results showed that the ratio of the degree of decentralization and the effectiveness of PAD of Mataram City was very good, with the contribution of PAD above 25% and the effectiveness of PAD realization always exceeded 100%. However, the level of fiscal dependence remains high (above 65%), and the ratio of fiscal independence shows a fluctuating trend that tends to stagnate, except in 2019. Keywords: Local Own Revenue, Fiscal Decentralization, Financial Independence, Fiscal Dependency, Effectiveness of PAD, Mataram City

1. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah menjadi tonggak penting dalam sejarah desentralisasi fiskal nasional, dengan tujuan utama memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks ini, setiap daerah dituntut untuk mandiri secara fiskal agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta revisinya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah adalah tingkat kemandirian fiskal, yang diukur melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian terdahulu, "PAD menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah (Saleh, 2020). Di sinilah letak pentingnya mengkaji secara mendalam kinerja PAD sebagai pilar utama pembiayaan daerah.

*Corresponding author

E-mail addresses: marhamahmee@gmail.com (Marhamah)

Secara konseptual, PAD mencakup seluruh pendapatan yang berasal dari wilayah administrasi daerah tersebut, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Komponen-komponen ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan membiayai pembangunan secara mandiri. Dalam kajian ([Qurrota A'yun et al., 2022](#)) dijelaskan bahwa "PAD merupakan sumber pendapatan yang bersumber dari dalam wilayah daerah itu sendiri," yang jika dikelola secara optimal, akan menjadi sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Di Kota Mataram, isu mengenai PAD menjadi semakin relevan mengingat kota ini merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), serta memiliki potensi fiskal dari sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Namun, efektivitas pemanfaatan potensi tersebut masih menjadi tantangan besar, sebagaimana ditegaskan oleh [Mustiani et al. \(2022\)](#), bahwa "efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kota Mataram masih rendah dan menjadi hambatan dalam optimalisasi PAD.

Dalam periode 2018–2023, realisasi PAD Kota Mataram menunjukkan tren yang fluktuatif, meskipun secara umum mengalami peningkatan dari Rp358,82 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp493,61 miliar pada tahun 2023. Meskipun demikian, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh, menyatakan bahwa pandemi "mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram, dengan dampak berupa penurunan pendapatan yang bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ([Ahyar, 2020](#)). Situasi ini tidak hanya menurunkan penerimaan PAD tetapi juga secara drastis menurunkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang pada tahun 2019 hanya sebesar Rp466,69 miliar dari sebelumnya Rp1.003 triliun pada 2018. Temuan ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal Kota Mataram terhadap dana pusat masih sangat tinggi, bahkan mencapai rata-rata di atas 65% setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan temuan [Wulandari et al., \(2023\)](#) yang menyatakan bahwa "ketergantungan tinggi terhadap dana transfer menandakan bahwa kemandirian fiskal Kota Mataram masih lemah dan perlu perbaikan.

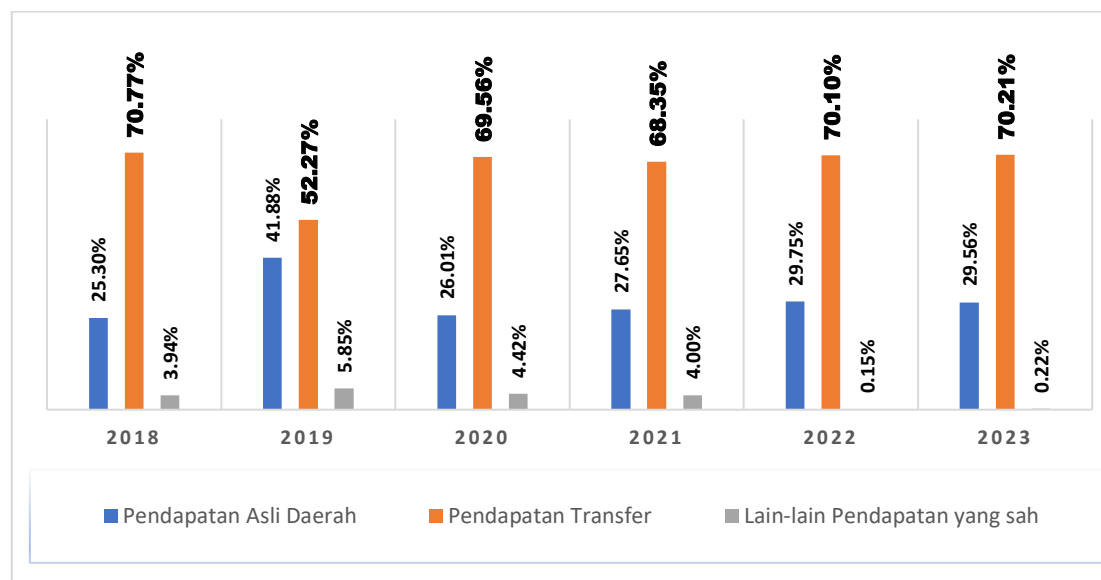
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)
2018	358.825.822.208	1.003.759.981.412	55.847.070.863
2019	373.951.422.339	466.699.546.641	52.246.780.000
2020	363.165.361.011	971.125.111.760	61.719.142.604
2021	392.556.124.241	970.243.717.002	56.821.712.249
2022	446.332.721.389	1.051.642.188.665	2.308.183.204
2023	493.612.256.926	1.172.258.100.334	3.750.000.000

Sumber: Data diolah dari BKD Kota Mataram Tahun 2025

Kondisi di atas menggambarkan bahwa efektivitas PAD di Kota Mataram, meskipun tinggi—dengan rasio efektivitas antara 100% hingga 113% pada tahun-tahun penelitian—belum cukup untuk menjamin kemandirian fiskal secara menyeluruh. Dalam teori oleh [Mahmudi \(2016\)](#), terdapat empat jenis rasio utama yang digunakan sebagai alat ukur, yaitu: rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian fiskal, dan rasio efektivitas PAD. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai secara komprehensif sejauh mana PAD mampu mendorong otonomi fiskal Kota Mataram.

Berdasarkan rasio derajat desentralisasi di atas, PAD Kota Mataram dikategorikan sangat baik, dengan puncaknya pada tahun 2019 sebesar 41,88%. Namun, pada saat yang sama, rasio ketergantungan keuangan daerah tetap berada pada level sangat tinggi ($>70\%$) selama hampir seluruh periode pengamatan. Ini menciptakan paradoks fiskal, di mana daerah mampu mengelola PAD secara efektif, tetapi belum mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian oleh [Kristina et al. \(2021\)](#) di Kabupaten Halmahera Tengah memperkuat fenomena ini, dengan menyatakan bahwa PAD berperan sebagai refleksi dari efektivitas tata kelola fiskal, sementara dana perimbangan justru cenderung menjadi sumber pendanaan pasif yang tidak mendorong kemandirian daerah.



Gambar 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Mataram Tahun 2018-2023

Variabilitas tingkat kemandirian fiskal di berbagai daerah di Indonesia semakin menegaskan pentingnya melakukan kajian spesifik terhadap Kota Mataram. Beberapa kota seperti Yogyakarta dan Pontianak menunjukkan hasil yang berbeda. Kota Yogyakarta, misalnya, menurut [Ernawati dan Putra Prasetya \(2024\)](#), memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup tinggi yang mendukung keberlanjutan keuangan pemerintah kota. Sebaliknya, Kota Payakumbuh, meskipun telah mengadopsi sistem digitalisasi, tetap menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana pusat ([Ardi & Zuripal, 2023](#)). Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa kemandirian fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD, tetapi juga oleh struktur ekonomi lokal, kapasitas kelembagaan, dan strategi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, pendekatan rasio keuangan sebagaimana dikemukakan oleh [Mahmudi \(2016\)](#) yang meliputi derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, kemandirian fiskal, dan efektivitas PAD—menjadi sangat relevan untuk mengukur secara komprehensif kondisi fiskal Kota Mataram.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Sejauh mana Pendapatan Asli Daerah mampu mendorong kemandirian keuangan Kota Mataram selama periode 2018–2023?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah, mengukur tingkat efektivitas pengelolaan PAD, serta menilai rasio kemandirian fiskal Kota Mataram berdasarkan indikator rasio keuangan yang dikemukakan oleh [Mahmudi \(2016\)](#). Penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kemandirian fiskal Kota Mataram serta menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penguatan kapasitas PAD secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis rasio keuangan, yang dianggap sesuai karena mampu memberikan gambaran objektif dan terukur mengenai kondisi serta kinerja keuangan daerah melalui data numerik yang bersumber dari dokumen resmi, terutama Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Mataram selama periode 2018 hingga 2023. Lokasi penelitian ini adalah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan objek kajian berupa data sekunder dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap laporan keuangan daerah yang telah diaudit serta data sekunder yang bersumber dari publikasi pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan sebagaimana dirumuskan oleh [Mahmudi \(2016\)](#). Meliputi empat indikator utama, yaitu: (1) rasio derajat desentralisasi fiskal, (2) rasio ketergantungan fiskal, (3) rasio kemandirian fiskal, dan (4) rasio efektivitas PAD.

Prosedur penelitian dimulai dari pengumpulan data realisasi anggaran tahunan, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan rasio-rasio keuangan menggunakan rumus baku yang telah diakui secara metodologis dalam literatur keuangan publik ([Mahmudi, 2016](#)). Selanjutnya, hasil analisis diklasifikasikan ke dalam kategori evaluatif berdasarkan standar presentase yang ditetapkan untuk masing-masing rasio. Hasil evaluasi ini kemudian dibandingkan dengan temuan dari penelitian terdahulu untuk memperoleh interpretasi kontekstual atas kondisi keuangan Kota Mataram.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Drajat Desentralisasi

Berikut ini adalah hasil perhitungan dalam bentuk tabel dan grafik rasio derajat desentralisasi Kota Mataram periode 2018 hingga 2023. Dengan Rumus (Peneliti);

$$\text{Rasio Drajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Pengukuran Rasio Drajat Desentralisasi

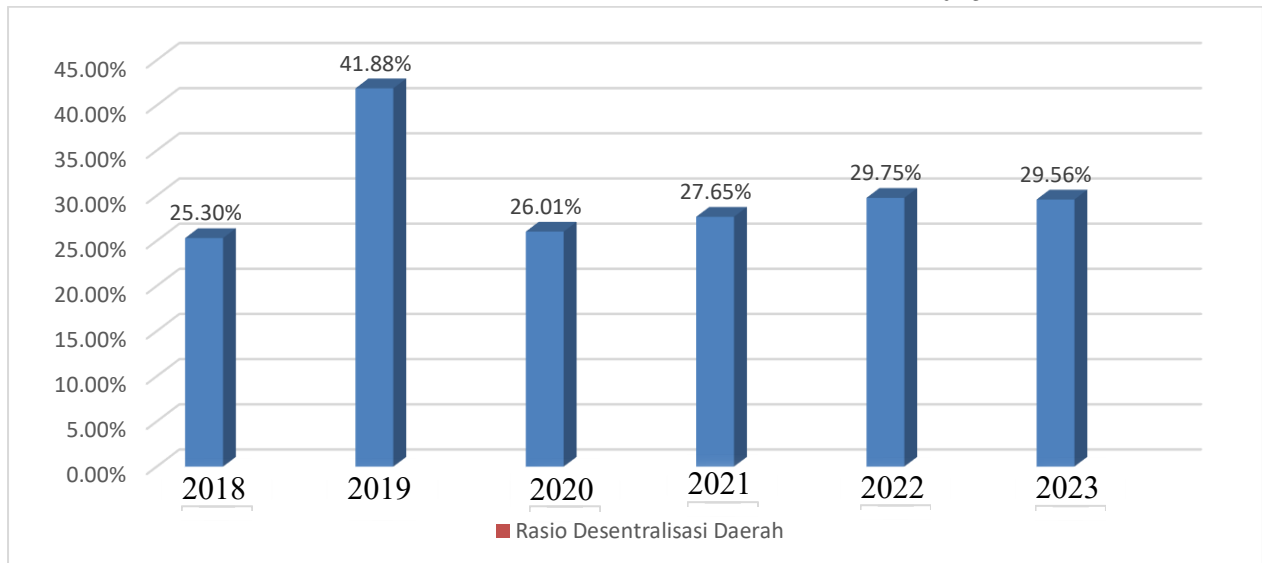
Presentase Rasio Drajat Desentralisasi (%)	Kriteria
0.00 - 10.00	Sangat Kurang
10.01 - 20.00	Kurang
20.01 - 30.00	Sedang
30.01 - 40.00	Cukup
40.01 - 50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Tabel 3. Perhitungan Hasil Rasio Drajat Desentralisasi Kota Mataram Tahun 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pendapatan	Rasio Drajat Desentralisasi	Keterangan
2018	Rp358.825.822.208	Rp 1.418.432.874.483	25,30%	Sangat Baik
2019	Rp373.951.422.339	Rp892.897.748.980	41,88%	Sangat Baik
2020	Rp363.165.361.011	Rp1.396.009.615.375	26,01%	Sangat Baik

2021	Rp392.556.124.241	Rp1.419.621.553.492	27,65%	Sangat Baik
2022	Rp446.332.721.389	Rp1.500.283.093.258	29,75%	Sangat Baik
2023	Rp493.612.256.926	Rp 1.669.620.357.260	29,56%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah dari BKD Kota Mataram Tahun 2025



Gambar 2. Grafik Rasio Rasio Desentralisasi Kota Mataram Tahun 2018-2023

Sumber: Data diolah dari BKD Kota Mataram Tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan dan tabel rasio pada periode 2018–2023, kondisi keuangan Kota Mataram pada rasio Derajat Desentralisasi selama enam tahun terakhir berada dalam kategori “Sangat Baik”, dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 41,88%. Hal ini mencerminkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar terhadap total pendapatan daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Fang et al. (2023) dalam *Regional Studies*, yang menyatakan bahwa peningkatan derajat desentralisasi dapat meningkatkan kapabilitas pembangunan lokal, asalkan didukung oleh institusi daerah yang efisien. Hal ini juga diperkuat oleh Suryani & Arifianto (2021) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mampu mendorong efisiensi belanja dan akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan Kota Mataram selama periode 2018 hingga 2023 yang ditampilkan melalui tabel hasil perhitungan dari rumus ketergantungan keuangan daerah dan dalam bentuk grafik berikut. Dengan Rumus (Peneliti):

$$\text{Kertergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Jumlah Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Pengukuran Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	Kriteria
0.00 - 10.00	Sangat Rendah
10.01 - 20.00	Rendah

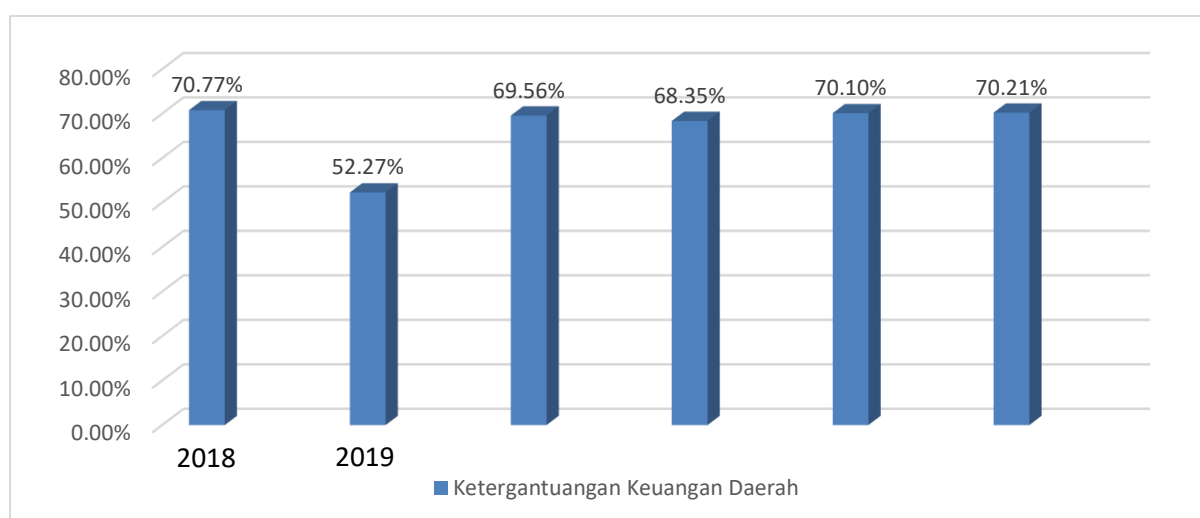
20.01 - 30.00	Sedang
30.01 - 40.00	Cukup
40.01 - 50.00	Tinggi
>50.00	Sangat Tinggi

Sumber : Mahmudi (2016)

Tabel 5. Perhitungan Hasil Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pendapatan	Rasio Drajat Desentralisasi	Keterangan
		Rp		
2018	Rp 1.003.759.981.412	1.418.432.874.483	70,77%	Sangat Tinggi
		Rp		
2019	Rp 466.699.546.641	892.897.748.980	52,27%	Sangat Tinggi
		Rp		
2020	Rp 971.125.111.760	1.396.009.615.375	69,56%	Sangat Tinggi
		Rp		
2021	Rp 970.243.717.002	1.419.621.553.492	68,35%	Sangat Tinggi
		Rp		
2022	Rp 1.051.642.188.665	1.500.283.093.258	70,10%	Sangat Tinggi
		Rp		
2023	Rp 1.172.258.100.334	1.669.620.357.260	70,21%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah dari BKD Kota Mataram Tahun 2025



Gambar 3. Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Mataram Tahun 2018-2023 (Sumber: Data diolah dari BKD Kota Mataram Tahun 2025)

Berdasarkan hasil dari gambar (6767) dari sisi Ketergantungan Keuangan Daerah, Kota Mataram masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer pusat, dengan persentase di atas 65% setiap tahun, dan mencapai 70,77% pada 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa otonomi fiskal masih belum sepenuhnya mandiri.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah diukur melalui rasio kemandirian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima. Adapun hasil perhitungan dalam bentuk tabel serta grafik rasio kemandirian keuangan Kota Mataram untuk tahun anggaran 2018 hingga 2023 disajikan sebagai berikut. Dengan Rumus (Peneliti):

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Jumlah Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 6. Kriteria Pengukuran Rasio Kemandirian Daerah

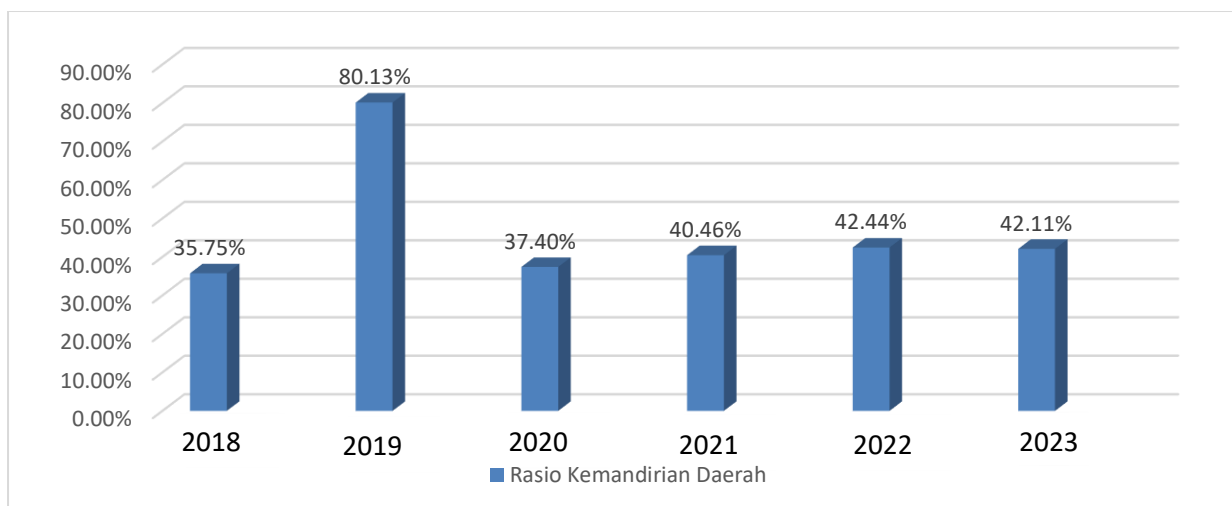
Presentase Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kriteria
0.00 - 10.00	Sangat Kurang
10.01 - 20.00	Kurang
20.01 - 30.00	Sedang
30.01 - 40.00	Cukup
40.01 - 50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi (2016)

Gambar 5. Grafik Rasio Efektivitas Keuangan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Kemandirian Keuangan Daerah	Keterangan
2018	Rp 1.003.759.981.412	Rp 1.003.759.981.412	35,75%	Cukup
2019	Rp 466.699.546.641	Rp 466.699.546.641	80,13%	Sangat Baik
2020	Rp 971.125.111.760	Rp 971.125.111.760	37,40%	Cukup
2021	Rp 970.243.717.002	Rp 970.243.717.002	40,46%	Baik
2022	Rp 1.051.642.188.665	Rp 1.051.642.188.665	42,44%	Baik
2023	Rp 1.172.258.100.334	Rp 1.172.258.100.334	42,11%	Baik

Sumber: Data diolah dari BKD Kota Mataram Tahun 2025



Gambar 4. Grafik Rasio Kemandirian Daerah Kota Mataram Tahun 2018-2023

Sumber: Data diolah dari BKD Kota Mataram Tahun 2025

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar (778768) Kemandirian Keuangan Daerah, rasio kemandirian menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata berada pada kategori “Cukup” hingga “Baik”. Tahun 2019 menjadi tahun dengan kemandirian tertinggi yaitu 80,13%, namun menurun lagi menjadi sekitar 42% pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan fiskal

Rasio Efektivitas keuangan Asli Daerah

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur melalui rasio efektivitas PAD yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan daerah dalam mencapai target penerimaan PAD yang telah ditetapkan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang diinginkan. Berikut ini disajikan hasil perhitungan dalam bentuk tabel dan grafik rasio efektivitas PAD Kabupaten Bandung Barat untuk tahun 2018 hingga 2023. Dengan Rumus (Peneliti):

$$\text{Efektivitas Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 8. Kriteria Penilaian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

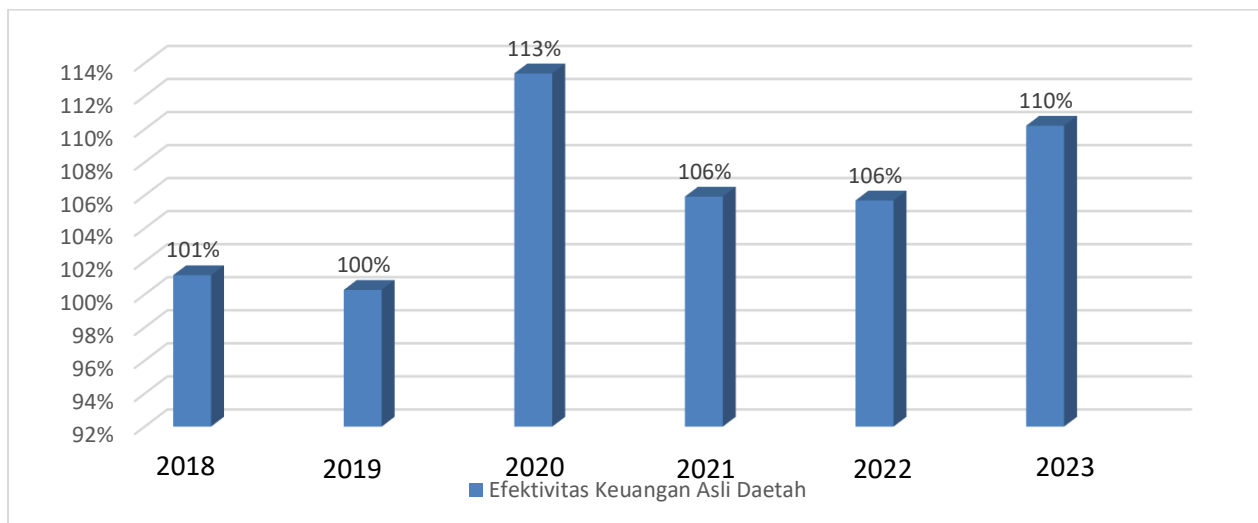
Presentase Penilaian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)	Kriteria
100	Sangat Efektif
91 -100	Efektif
81 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2016)

Tabel 9. Perhitungan Hasil Rasio Efektivitas Keuangan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2018-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Efektivitas Keuangan Asli Daerah	Keterangan
2018	Rp 358.825.822.208	Rp 354.697.095.359	101%	Sangat Efektif
2019	Rp 373.951.422.339	Rp 372.928.500.000	100%	Sangat Efektif
2020	Rp 363.165.361.011	Rp 320.309.008.468	113%	Sangat Efektif
2021	Rp 392.556.124.241	Rp 370.608.032.419	106%	Sangat Efektif
2022	Rp 446.332.721.389	Rp 422.308.562.050	106%	Sangat Efektif
2023	Rp 493.612.256.926	Rp 447.862.217.089	110%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah dari BKD Kota Mataram Tahun 2025



Gambar 7. Perhitungan Hasil Rasio Kemandirian Daerah Kota Mataram Tahun 2018-2023

Sumber: Data diolah dari BKD Kota Mataram Tahun 2025

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar (778768) Efektivitas Keuangan Daerah, data menunjukkan bahwa Kota Mataram berhasil melampaui target PAD setiap tahunnya, dengan rasio efektivitas antara 101% hingga 113%. Hal ini dikategorikan sebagai “Sangat Efektif”, dan menjadi sinyal positif terhadap perencanaan anggaran yang realistis serta pengelolaan PAD yang baik.

Desentralisasi Fiskal

Nilai rasio DDF Kota Mataram yang relatif tinggi (rata-rata $\approx 29\%$) menunjukkan pemanfaatan PAD cukup optimal dalam struktur APBD. Peningkatan tajam pada 2019 (41,88%) mengindikasikan kontribusi PAD meningkat karena total pendapatan menurun drastis (penurunan transfer pusat), sehingga peran PAD lebih besar secara proporsional. Hasil

ini konsisten dengan studi [Zukhri \(2020\)](#) yang menemukan derajat desentralisasi moderat di Bangka Belitung (29–33%). Menurut [Saragih et al. \(2023\)](#), desentralisasi fiskal yang tinggi memperkuat otonomi daerah dalam mengelola anggaran. Demikian pula, [Wijaya \(2019\)](#) menyebutkan bahwa peningkatan DDF berdampak positif pada kesejahteraan local. Dengan DDF yang tergolong “Sangat Baik”, Kota Mataram secara teoritis memiliki kapabilitas fiskal lebih besar untuk pembangunan, asalkan didukung tata kelola daerah yang efisien.

Ketergantungan Fiskal

Rasio ketergantungan yang konsisten di atas 50% menandakan Mataram sangat bergantung pada dana pusat. Penurunan ketergantungan tahun 2019 (52,27%) semata akibat menurunnya alokasi transfer pusat, bukan karena peningkatan PAD yang bermakna. Kondisi ini sejalan dengan temuan [Saragih et al. \(2023\)](#), yang juga melaporkan rasio ketergantungan “sangat tinggi” pada pemerintahan kabupaten hasil pemekaran (sekitar 68–70%). Tingginya ketergantungan bisa memunculkan kerentanan fiskal jika transfer berkurang. Penelitian oleh [Dwiandari & Badera \(2018\)](#) menemukan bahwa ketergantungan tinggi cenderung menghambat kemakmuran lokal. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD sangat penting untuk menurunkan ketergantungan ini.

Kemandirian Fiskal

Nilai rasio kemandirian Mataram fluktuatif, dengan rata-rata di bawah 50%, kecuali Tahun 2019 merupakan satu-satunya tahun dengan kemandirian tinggi (80,13%), yang tampaknya disebabkan oleh penurunan drastis transfer pusat, bukan peningkatan PAD. Artinya, sumber PAD masih lebih kecil daripada dana transfer, kedua penerimaan hampir seimbang hanya pada 2019. Tingkat kemandirian ini masih tergolong sedang (“Cukup” hingga “Baik” menurut kriteria). Hasil ini mirip dengan penelitian [Saragih et al. \(2023\)](#), yang melaporkan kemandirian daerah berada pada level “belum mandiri” jika rasio di bawah 40%. Solusi untuk meningkatkan kemandirian, [Martinez-Vazquez & Timofeev \(2011\)](#), menekankan perlunya memperluas basis PAD dan mengurangi ketergantungan transfer. Penelitian oleh [Gunawan & Surjandari \(2022\)](#), juga menemukan bahwa daerah dengan PAD lebih tinggi mampu lebih mandiri fiskal nya. Dengan demikian, Mataram perlu strategi intensifikasi-ekstensifikasi PAD (misal pemanfaatan potensi pariwisata, pajak daerah berbasis teknologi) agar rasio kemandirian dapat meningkat secara berkelanjutan.

Efektivitas PAD

Pemerintah Kota Mataram berhasil melebihi target PAD setiap tahun (nilai efektivitas >100%). Menurut kriteria, nilai >100% digolongkan “Sangat Efektif”. Efektivitas PAD yang sangat tinggi menunjukkan bahwa target penerimaan PAD disusun secara realistis dan mampu direalisasikan bahkan melebihi target. Temuan ini juga dipandang positif pasca-pandemi, sejalan [Vebiani et al. \(2022\)](#) bahwa efektivitas PAD menjadi indikasi sukses reformasi fiskal daerah. Keberhasilan Mataram dalam melampaui target PAD menunjukkan upaya optimalisasi penerimaan (misalnya melalui perbaikan basis data dan pelayanan pajak). Namun, efektivitas tinggi tetap perlu dijaga agar tidak semata-mata karena target yang terlalu rendah; perlu perbaikan berkelanjutan agar PAD mencukupi semua kebutuhan APBD. Dari keseluruhan hasil, meski efektivitas PAD dan derajat desentralisasi tergolong sangat baik, tingginya ketergantungan dan rendahnya kemandirian fiskal menunjukkan bahwa Kota Mataram belum sepenuhnya mencapai otonomi fiskal yang optimal. Dibutuhkan kebijakan pendukung seperti diversifikasi sumber PAD, peningkatan disiplin anggaran, serta reformasi administrasi fiskal untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini secara sistematis menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengukur kemandirian keuangan Kota Mataram selama periode 2018–2023 melalui pendekatan rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun rasio derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berada dalam kategori sangat baik setiap tahunnya, kemandirian fiskal Kota Mataram belum sepenuhnya optimal akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai lebih dari 25%, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal telah berjalan relatif baik. Efektivitas PAD yang konsisten melebihi 100% mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan lokal dan menyusun target yang realistis. Namun, dominasi transfer pusat dalam struktur APBD yang melebihi 65% setiap tahun menunjukkan bahwa Kota Mataram masih belum mampu berdiri secara fiskal tanpa dukungan signifikan dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal yang fluktuatif dan belum stabil, terutama di luar tahun 2019, menunjukkan adanya ketergantungan struktural yang perlu diatasi melalui strategi fiskal yang lebih progresif. Oleh karena itu, perlu dilakukan diversifikasi sumber PAD, penguatan kelembagaan fiskal daerah, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam menguji kembali validitas indikator rasio fiskal yang dikembangkan Mahmudi (2016) dalam konteks pemerintahan kota. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan strategis bagi Pemerintah Kota Mataram dalam memperkuat otonomi fiskal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengintegrasikan variabel eksternal seperti pertumbuhan ekonomi daerah, digitalisasi layanan perpajakan, atau struktur belanja daerah guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kemandirian keuangan daerah.

5. REFERENSI

- Ahyar, A. (2020). Realisasi PAD kota Mataram.
- Ardi, S., & Zuripal, Z. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 381–394. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2719>
- Dwiyandari, L. D. Y., & Badera, I. D. N. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1741. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p04>
- Ernawati, E., & Putra Prasetya, B. (2024). Pengaruh IPM dan Kemandirian Keuangan Terhadap Financial Sustainability Pemerintah Kota Yogyakarta. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 76–81. <https://doi.org/10.36815/prive.v7i1.3305>
- Gunawan, C. T., & Surjandari, D. A. (2022). Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Earnings Management on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(2), 184–190. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.2.14>
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Martinez-Vazquez, J., & Timofeev, A. (2011). Choosing between Centralized and Decentralized Models of Tax Administration. *SSRN Electronic Journal*, January. <https://doi.org/10.2139/ssrn.901821>
- Mustiani, I., Effendy, L., & Nurabiah, N. (2022). Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(S1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1.2020>
- Qurrota A'yun, I., Vianti, W. O., & Zainal, Z. (2022). Determinants of Original Local Government Revenue (PAD): Case Studies of 34 Provinces in Indonesia. *JAMPE*

- (Journal of Asset Management and Public Economy), 1(2), 35–46.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 15(2), 111–134. <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Saragih, R., Terapan, M., Informasi, S., Medan, P. N., Samosir, K., & Nias, K. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i2.14810>
- Vebiani, D., Nugraha, & Hardiana, R. D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Journal of finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(1), 113–126.
- Wijaya, K. (2019). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Kemiskinan, dan Pengangguran. *Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 56–58.
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>